



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA : DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **TEGUH HARIYONO**
2. Jabatan : **KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)**
3. NHK : **487838**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 956.555.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1311 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 381.555.000
2. Tanah Seluas 7432 m2 di KAB / KOTA SIGI, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
3. Tanah Seluas 1222 m2 di KAB / KOTA SIGI, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
4. Tanah Seluas 1233 m2 di KAB / KOTA SIGI, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
5. Tanah Seluas 4500 m2 di KAB / KOTA SIGI, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
6. Tanah Seluas 2144 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
7. Tanah Seluas 1049 m2 di KAB / KOTA SIGI, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 153 m2/50 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HIBAH TANPA AKTA Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 153.000.000

1. MOBIL, TOYOTA DUMP TRUCK Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000



3. MOBIL, TOYOTA MINI BUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
80.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	43.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	178.242.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.330.797.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.330.797.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.